



Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Sektor Kesehatan Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2020-2023

The Effect Of Government Expenditure In The Education Sector, Health Sector Expenditure And Special Autonomy Fund On Financial Performance In Regencies/Cities In Aceh Province In 2020-2023

Farica Yusrina Lubis^{1*}, Muttaqien², Rico Nur Ilham³, Ghazali Syamni⁴

Manajemen, Ekonomi, Universitas Malikussaleh

Email: farica.210410124@mhs.unimal.ac.id^{1*}, muttaqien@unimal.ac.id², riconurilham@unimal.ac.id³

ghazali.syamni@unimal.ac.id⁴

Article Info**Article history :**

Received : 27-05-2025

Revised : 29-05-2025

Accepted : 01-06-2025

Published : 03-06-2025

Abstract

This study aims to analyze the influence of Government Expenditure in the Education Sector (PSP), Health Sector Expenditure (PKS), and the Special Autonomy Fund (DOK) on the Regional Financial Performance (KK) of Regencies/Cities in Aceh Province during the 2020-2023 period. Using a quantitative approach with panel data from 23 regencies/cities (saturated sample) and analyzed using a panel data regression model (Random Effect Model - REM selected based on testing), this study found that: (1) Government Expenditure in the Education Sector (PSP) has a positive and significant effect on regional Financial Performance. (2) Health Sector Expenditure (PKS) was not found to have a significant effect on regional Financial Performance. (3) The Special Autonomy Fund (DOK) was also not found to have a significant effect on regional Financial Performance. These findings indicate the importance of effective education budget allocation in improving regional financial performance in Aceh, while the effectiveness of health spending and the special autonomy fund on financial performance requires further study

Keywords : Regional Financial Performance, Government Expenditure, Special Autonomy Fund

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PSP), Pengeluaran Sektor Kesehatan (PKS), dan Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap Kinerja Keuangan (KK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode 2020-2023. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 23 kabupaten/kota (sampel jenuh) dan dianalisis menggunakan model regresi data panel (dipilih Random Effect Model-REM berdasarkan pengujian), penelitian ini menemukan bahwa: (1) Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PSP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah. (2) Pengeluaran Sektor Kesehatan (PKS) tidak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah. (3) Dana Otonomi Khusus (DOK) juga tidak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan pentingnya alokasi anggaran pendidikan yang efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Aceh, sementara efektivitas belanja kesehatan dan dana otonomi khusus terhadap kinerja keuangan memerlukan kajian lebih lanjut.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Dana Otonomi Khusus



PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia, yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian diperbarui dengan UU No. 33 Tahun 2004), memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan pembangunannya secara mandiri. Dalam konteks ini, Provinsi Aceh mendapatkan perhatian khusus melalui status Otonomi Khusus (Otsus) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan dikuatkan oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Kebijakan ini memberikan Aceh sumber pendanaan tambahan berupa Dana Otonomi Khusus (DOK) yang signifikan, bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca konflik dan bencana tsunami (Arispen et al., 2021; Putra & Amran, 2023).

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Kinerja keuangan yang baik, sering diukur melalui rasio kemandirian (perbandingan Pendapatan Asli Daerah/PAD dengan Pendapatan Transfer), mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat (Mahmudi, 2010). Namun, banyak daerah di Indonesia, termasuk kabupaten/kota di Provinsi Aceh, masih menghadapi tantangan rendahnya kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian (Aulia & Rahmawaty, 2020; Niswani et al., 2022).

Di tengah upaya peningkatan kinerja keuangan dan kemandirian daerah, alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor kunci seperti pendidikan dan kesehatan memegang peranan strategis. Pendidikan dianggap sebagai investasi modal manusia (human capital) yang fundamental untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jangka panjang (Fadila et al., 2023; Surjaya, 2022). Pemerintah Indonesia, melalui UU No. 20 Tahun 2003, mengamanatkan alokasi minimal 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Demikian pula, pengeluaran sektor kesehatan krusial untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang merupakan komponen penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan produktivitas ekonomi (Akuntansi et al., 2022; Digdowiseiso et al., 2022).

Provinsi Aceh, dengan adanya DOK, memiliki sumber daya tambahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui investasi strategis di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, efektivitas pengelolaan DOK dan dampaknya terhadap kinerja keuangan serta sektor-sektor prioritas masih menjadi perdebatan (Arispen et al., 2021; Anwar et al., 2018). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai pengaruh belanja pendidikan, kesehatan, dan dana transfer (termasuk DOK) terhadap kinerja keuangan daerah di berbagai wilayah Indonesia (Niswani et al., 2022; Putri & Priyadi, 2021; Permatasari & Trisnangsih, 2022; Ayu Putu Ni et al., 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PSP), pengeluaran sektor kesehatan (PKS), dan Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap kinerja keuangan (diukur dengan rasio kemandirian) kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020-2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas alokasi anggaran pada sektor-sektor prioritas dan DOK dalam mendorong kemandirian fiskal daerah di Provinsi Aceh.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PSP), pengeluaran sektor kesehatan (PKS), dan Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap Kinerja Keuangan (KK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Objek penelitian adalah 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020-2023.

Populasi penelitian ini mencakup seluruh 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Mengingat jumlah populasi yang terbatas dan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Dengan periode penelitian 4 tahun (2020-2023), total observasi dalam penelitian ini adalah 92 (23 kabupaten/kota x 4 tahun).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif dalam bentuk data panel, yang merupakan gabungan data cross-section (23 kabupaten/kota) dan data time series (2020-2023). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh (<https://aceh.bps.go.id>), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan RI (www.djpk.depkeu.go.id), dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) (<https://bpkd.acehprov.go.id>).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan (KK) daerah, yang diukur menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Transfer, menggunakan rumus: $RKKD = (PAD / \text{Pendapatan Transfer}) \times 100\%$ (Mahmudi, 2010). Variabel independen meliputi: (1) Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PSP), diukur dalam Rupiah berdasarkan data realisasi anggaran pendidikan APBD; (2) Pengeluaran Sektor Kesehatan (PKS), diukur dalam Rupiah berdasarkan data realisasi anggaran kesehatan APBD; dan (3) Dana Otonomi Khusus (DOK), diukur dalam Rupiah berdasarkan data alokasi DOK yang diterima masing-masing kabupaten/kota.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Pemilihan model regresi data panel terbaik (antara Common Effect Model/CEM, Fixed Effect Model/FEM, dan Random Effect Model/REM) dilakukan melalui serangkaian pengujian: Uji Chow (membandingkan CEM vs FEM), Uji Hausman (membandingkan FEM vs REM), dan Uji Lagrange Multiplier (membandingkan CEM vs REM). Berdasarkan hasil pengujian pada skripsi asli, model yang terpilih adalah Random Effect Model (REM).

Sebelum melakukan estimasi regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi: Uji Normalitas (menggunakan Jarque-Bera test, meskipun asumsi ini dapat dilonggarkan untuk data panel menurut Gujarati & Porter, 2012), Uji Multikolinearitas (melihat matriks korelasi antar variabel independen), Uji Heteroskedastisitas (menggunakan Uji Glejser), dan Uji Autokorelasi (menggunakan statistik Durbin-Watson). Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial menggunakan Uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Selain itu, dihitung juga koefisien determinasi (Adjusted R²) untuk melihat seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis data dan pembahasan temuan penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PSP), pengeluaran sektor kesehatan (PKS),



dan Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap Kinerja Keuangan (KK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2020-2023.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif terhadap 92 observasi (23 kabupaten/kota selama 4 tahun) menunjukkan gambaran umum variabel penelitian. Rata-rata Kinerja Keuangan (rasio kemandirian) adalah 12.46%, dengan nilai maksimum 36.24% (Kota Banda Aceh, 2022) dan minimum 1.99% (Kota Subulussalam, 2022). Standar deviasi yang relatif kecil (5.59%) dibandingkan rata-rata menunjukkan data kinerja keuangan cenderung homogen. Rata-rata PSP adalah Rp 295.38 miliar, PKS Rp 259.99 miliar, dan DOK Rp 97.05 miliar. Variabel PSP, PKS, dan DOK juga menunjukkan standar deviasi yang lebih kecil dari rata-ratanya, mengindikasikan data yang homogen dan kebijakan alokasi yang cenderung serupa antar daerah. Hasil lengkap statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

No	Statistik	KK	PSP	PKS	DOK
1	Mean	12.46467	295379.4	259991.4	97050.79
2	Medium	11.08000	269955.5	207777.0	91890.00
3	Maximum	36.24000	996957.0	984793.0	902882.0
4	Minimum	1.990000	197.7530	97976.00	20738.00
5	Std. Dev.	5.587210	160088.5	195728.9	91556.31
6	ovservatian	92	92	92	

Keterangan: KK (Kinerja Keuangan - Rasio Kemandirian %), PSP (Pengeluaran Sektor Pendidikan - Juta Rp), PKS (Pengeluaran Sektor Kesehatan - Juta Rp), DOK (Dana Otonomi Khusus - Juta Rp)

2. Analisis Korelasi

Hasil analisis korelasi (Tabel 2) menunjukkan hubungan antar variabel. Korelasi antara PSP dan KK positif namun tidak signifikan (0.128). Korelasi antara PKS dan KK positif dan signifikan pada level 10% (0.180, p=0.0883). Korelasi antara DOK dan KK sangat rendah dan tidak signifikan (0.020). Antar variabel independen, korelasi tertinggi ditemukan antara PSP dan DOK (0.346, p=0.0008), namun masih di bawah ambang batas multikolinearitas (0.8), menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas yang serius.

Tabel 2. Analisis Korelasi Antar Variabel (*Logaritma Natural*)

No	Variabel	LOG_KK	LOG_PSP	LOG_PSK	LOG_DOK
1	LOG_KK	1.000000			
2	LOG_PSP	0.128355	1.000000		
3		(0.2253)			
4	LOG_PSK	0.179717	0.108828	1.000000	
5		(0.0883)	(0.3045)		
6	LOG_DOK	0.019754	0.345260	0.136529	1.000000
7		(0.8526)	(0.0008)	(0.1969)	

(Nilai dalam kurung adalah p-value)

3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil Uji Chow (Tabel 3), Fixed Effect Model (FEM) lebih baik daripada Common Effect Model (CEM) (Prob. Chi-square = 0.0000 < 0.05). Selanjutnya, hasil Uji Hausman (Tabel 4) menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) lebih baik daripada FEM (Prob. Chi-square = 0.9319 > 0.05). Hasil Uji Lagrange Multiplier (Tabel 5) juga



mengkonfirmasi bahwa REM lebih baik daripada CEM (Prob. Breusch-Pagan = 0.0000 < 0.05). Dengan demikian, model estimasi yang paling tepat untuk penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

Tabel 3. Hasil Uji Chow

No	Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
1	Cross-section F	6.5662	(22, 66)	0.0000
2	Cross-section Chi-square	106.6855	22	0.0000

4. Hasil Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

No	Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
1	Cross-section random	0.4399	3	0.9319

5. Hasil Uji Lagrange Multiplier (Breusch-Pagan)

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier (Breusch-Pagan)

No	Test Statistic	Cross-section	Time	Both
1	Breusch-Pagan	45.8266	0.0494	45.876
2	(Prob.)	(0.0000)	(0.8240)	(0.0000)

6. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik pada model REM menunjukkan: (1) Uji Normalitas (Jarque-Bera) mengindikasikan data residual tidak terdistribusi normal (Prob = 0.0000), namun asumsi ini dapat diabaikan untuk data panel karena setiap *cross section* memiliki *trend* data yang berbeda-beda. (2) Uji Multikolinearitas (Tabel 6) menunjukkan tidak ada korelasi tinggi antar variabel independen (semua korelasi < 0.8). (3) Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser - Tabel 7) menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas (semua Prob. > 0.05). (4) Uji Autokorelasi (Durbin-Watson = 2.9351, dari hasil output regresi Tabel 8) menunjukkan adanya indikasi autokorelasi negatif, yang perlu menjadi catatan dalam interpretasi hasil.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas (Matriks Korelasi Variabel Independen)

No	Variabel	LOG_PSP	LOG_PKS	LOG_DOK
1	LOG_PSP	1.000000	0.1091	0.3456
2	LOG_PKS	0.1091	1.000000	0.1369
3	LOG_DOK	0.3456	0.1369	1.000000

7. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

No	Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
1	C	1.3587	1.1189	1.2146	0.2289
2	LOG_PSP	0.0468	0.0408	1.1463	0.2559
3	LOG_PKS	0.0953	0.0673	1.4147	0.1619
4	LOG_DOK	-0.0598	0.0737	-0.8115	0.4201



8. Hasil Estimasi Regresi

Tabel 8. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

No	Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
1	C	-12.97165	8.912209	-1.455492	0.1505
2	LOG_PSP	3.528738	1.127118	3.130762	0.0026
3	LOG_PKS	0.987030	1.044206	0.945066	0.3482
4	LOG_DOK	0.042762	1.002133	0.042671	0.9661
5	<i>Statistik Model</i>				
6	<i>R-squared</i>	0.585654	<i>Mean dependent var</i>	12.10112	
7	<i>Adjusted R-squared</i>	0.421231	<i>S.D. dependent var</i>	5.630770	
8	<i>S.E. of regression</i>	4.283712	<i>Akaike info criterion</i>	5.986285	
9	<i>Sum squared resid</i>	1156.062	<i>Schwarz criterion</i>	6.713302	
10	<i>Log likelihood</i>	-240.3897	<i>Hannan-Quinn</i>	6.279325	
11	<i>F-statistic</i>	3.561877	<i>critier</i>	2.127623	
12	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000	<i>Durbin-Watson stat</i>		

Pembahasan

Pengaruh Pengeluaran Sektor Pendidikan (PSP) terhadap Kinerja Keuangan (KK): Koefisien regresi log(PSP) adalah 3.5287 dengan nilai probabilitas (p-value) 0.0026. Karena p-value < 0.05, maka H₁ diterima. Artinya, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang efektif tampaknya berkontribusi pada peningkatan kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan atau mengelola keuangannya secara lebih mandiri. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa investasi pendidikan meningkatkan kualitas SDM yang pada gilirannya mendorong aktivitas ekonomi dan potensi pendapatan daerah, serta konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan dampak positif belanja sektor publik tertentu terhadap kinerja (misalnya, Niswani et al., 2022, meskipun fokus pada belanja modal).

Pengaruh Pengeluaran Sektor Kesehatan (PKS) terhadap Kinerja Keuangan (KK): Koefisien regresi log(PKS) adalah 0.9870 dengan nilai probabilitas (p-value) 0.3482. Karena p-value > 0.05, maka H₂ ditolak. Artinya, Pengeluaran Sektor Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode penelitian. Meskipun secara teori belanja kesehatan penting, dampaknya terhadap rasio kemandirian keuangan mungkin tidak langsung atau memerlukan waktu lebih lama untuk terlihat. Bisa jadi efektivitas alokasi belanja kesehatan belum optimal dalam mendorong peningkatan PAD atau efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini berbeda dengan beberapa studi (misalnya, Akuntansi et al., 2022) namun mungkin mencerminkan kondisi spesifik di Aceh.

Pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap Kinerja Keuangan (KK): Koefisien regresi log(DOK) adalah 0.0428 dengan nilai probabilitas (p-value) 0.9661. Karena p-value > 0.05, maka H₃ ditolak. Artinya, Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (rasio kemandirian) kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Temuan ini menarik, mengingat DOK merupakan sumber pendanaan signifikan. Ini bisa mengindikasikan bahwa DOK lebih banyak digunakan untuk belanja operasional atau program yang tidak secara langsung meningkatkan PAD atau mengurangi ketergantungan pada transfer lain, atau mungkin pengelolaan dan pemanfaatannya belum efektif dalam mendorong kemandirian fiskal. Hasil ini kontras dengan temuan Anwar et al. (2018) tetapi sejalan dengan kekhawatiran yang diungkapkan Arispen et al. (2021) mengenai efektivitas DOK.



Nilai Adjusted R-squared model REM adalah 0.4212 (dari Tabel 8), menunjukkan bahwa sekitar 42.12% variasi Kinerja Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel PSP, PKS, dan DOK dalam model ini. Sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Temuan dari analisis literatur dan gambaran umum data menunjukkan kompleksitas hubungan antara pengeluaran sektor publik, dana transfer khusus, dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Aceh. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer, termasuk DOKA, menjadi karakteristik utama fiskal daerah di Aceh. Hal ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang. Tantangannya adalah memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan, serta mendorong peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Peluangnya adalah dana tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah untuk berinvestasi pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

Isu efektivitas dan efisiensi pengelolaan DOKA yang diangkat oleh beberapa peneliti (Alqarni et al., 2022; Putra & Amran, 2023; Akbar et al., 2021) menjadi krusial. Jika dana yang besar ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya terhadap kinerja keuangan (misalnya, efisiensi belanja) dan hasil pembangunan (misalnya, kualitas pendidikan yang disorot Alqarni et al., 2022, atau IPM yang ditemukan menurun oleh Arispen & Rahmi, 2020) bisa jadi tidak optimal atau bahkan negatif.

Pengaruh belanja pendidikan dan kesehatan terhadap kinerja keuangan juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Meskipun alokasi anggaran penting, kualitas belanja (efisiensi dan efektivitas) jauh lebih menentukan dampaknya. Peningkatan anggaran tanpa disertai perbaikan tata kelola, perencanaan yang matang, dan pengawasan yang kuat mungkin tidak akan secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan maupun kualitas layanan publik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang diteliti dalam studi ini, tetapi juga oleh faktor lain seperti kualitas perencanaan anggaran, kapasitas aparatur, kondisi ekonomi makro regional, serta faktor kelembagaan dan politik lokal. Oleh karena itu, interpretasi hasil perlu mempertimbangkan konteks yang lebih luas ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan Random Effect Model (REM) terhadap data 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2020-2023, penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PSP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah (rasio kemandirian). Hal ini menggarisbawahi pentingnya investasi yang efektif di sektor pendidikan sebagai pendorong kemandirian fiskal daerah di Aceh. Kedua, Pengeluaran Sektor Kesehatan (PKS) tidak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah. Ketiga, Dana Otonomi Khusus (DOK) juga tidak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah selama periode penelitian.

Temuan mengenai tidak signifikannya pengaruh PKS dan DOK terhadap rasio kemandirian memerlukan perhatian khusus. Pemerintah daerah di Provinsi Aceh perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas alokasi dan pemanfaatan anggaran kesehatan serta Dana Otonomi Khusus agar kontribusinya terhadap peningkatan kinerja dan kemandirian keuangan daerah dapat lebih optimal. Implikasi kebijakan utama adalah perlunya terus memperkuat dan memastikan efektivitas belanja pendidikan, sambil mengkaji ulang strategi alokasi dan implementasi program di sektor kesehatan dan pemanfaatan DOK agar lebih berdampak pada kemandirian fiskal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti potensi adanya autokorelasi negatif dalam model dan kemungkinan adanya variabel lain di luar model yang mempengaruhi kinerja keuangan.



Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain tersebut, menggunakan periode waktu yang lebih panjang, atau menerapkan metode analisis yang berbeda untuk mengatasi potensi autokorelasi dan memperkaya pemahaman mengenai dinamika kinerja keuangan daerah di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, R. D., Setiyowati, S. W., & Irianto, M. F. (2024). DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemda Se Jawa Timur Tahun 2020-2022). *JURNAL AKUNTANSI*, 13(1). dilihat 30 Mei 2025 <https://doi.org/10.37932/ja.v13i1.859>
- Asnidar, A., Putri, A., & Hanum, N. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(2). dilihat 30 Mei 2025 <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1374>
- Aulia, G. R. N., Daeng, A., & Fatimah, S. (2023). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG KESEHATAN DAN PENDAPATAN PER KAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KOTA MATARAM TAHUN 2012-2021. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 2(2).
- Auliani, D., Achmad, E., & Parmadi, P. (2024). Analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 12(1). dilihat 30 Mei 2025 <https://doi.org/10.22437/pim.v12i1.36137>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Indeks Pembangunan Manusia. BPS.
- Damayanti, A. P., & Suryaningrum, D. H. (2023). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM): (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(3). dilihat 30 Mei 2025 <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1733>
- Dawood, Muttaqien dkk. (2023), Meningkatkan Produksi UMKM melalui Pelatihan Produksi dan Pemasaran Briket Arang, *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1). dilihat 2 Juni 2025 [3141-9015-1-PB\[1\].pdf](https://doi.org/10.3141-9015-1-PB[1].pdf)
- Febrianto, M., & Esther, A. M. (2023). PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN, ANGGARAN KESEHATAN, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2). dilihat 30 Mei 2025 <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17787>
- Hapsari, M. T., Syahira, D., Rahmadita, A., Ayunda, S. S. D., Azhari, K. D., & Supit, A. S. N. (2024). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019-2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 10(3). dilihat 30 Mei 2025 <https://doi.org/10.35972/jieb.v10i3.1752>
- Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129–140. dilihat 30 Mei 2025 <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i3.3514>
- Hasibuan, S. A., & Syahbudi, M. (2022). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(4), 1158-1166. dilihat 30 Mei 2025 <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13218>
- Hutasoit, D. H., Saragih, J. R. S., Simanungkalit, J. S. L., Lubis, R. J., & Lubis, P. K. D. (2024). Analisis Pengaruh Indeks Demokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Mengoptimalkan Fungsi Otonomi dan Desentralisasi Daerah. *Journal of Business Inflation Management and*



- Accounting*, 2(1). dilihat 31 Mei 2025
<https://rayyanjurnal.com/index.php/bima/article/view/4785>
- Irawan, A., & Akbar, A. (2021). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017-2020. *KLASSEN*, 1(2).
- Mulia, S., & Widiatmoko, J. (2025). DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1). dilihat 31 Mei 2025 <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5377>
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Leverage pada Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *FAIR : FINANCIAL & ACCOUNTING INDONESIAN RESEARCH*, 2(1), 18-32.
- Nasrudin, N., Kurniati, N., Syaumudinsyah, S., & Iswan, I. (2025). ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 13(1). dilihat 31 Mei 2025 <https://doi.org/10.53952/jir.v13i1.607>
- Nasruddin, N., & Azizah, N. A. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara Asean. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 3(1), 45–56. dilihat 31 Mei 2025 <https://doi.org/10.20527/jgp.v3i1.5031>
- Oktafiyana, E., & Muliati. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan serta Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 20(1). dilihat 31 Mei 2025 <https://doi.org/10.30872/jinv.v20i1.1692>
- Panisah, P., Yusuf, M., Maharani, S., Kamilah, S. A., Abid, M. A., Narendra, A., & Zulkarnain, M. (2024). Pengeluaran Pemerintah Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi (J-SIME)*, 1(2), 70-85.
- Putri, C. V., & Nasir, M. (2023). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 88-101.
- Remanta, O. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 457-465. dilihat 31 Mei 2025 <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1193>
- Siregar, H. A. (2023). Aspek Kinerja Keuangan Daerah yang Berdampak Pada Pembangunan Manusia di Daerah Pemekaran. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(2), 157-167. dilihat 31 Mei 2025 <https://doi.org/10.37859/jae.v13i2.5530>
- Taslim, F. A., & Pratama, R. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(2). dilihat 31 Mei 2025 <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i2.647>
- Vebiani, D., Nugraha, N., & Hardiana, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Fineteach : Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(2). dilihat 31 Mei 2025 <https://doi.org/10.17509/fineteach.v1i2.48137>